

**EVALUASI PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010 TENTANG
SAP BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN POLRES TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

DWI NURSANTI

NIM : 12110055



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

**EVALUASI PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010 TENTANG
SAP BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN POLRES TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

DWI NURSANTI

NIM : 12110055

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**EVALUASI PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010 TENTANG
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DALAM
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA POLRES
TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

DWI NURSANTI
NIM : 12110055

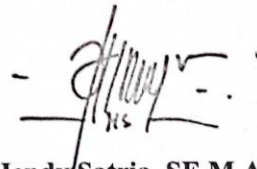
Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulaiqa, SE.M.Ak.,CA
NIDN. 1004117710 / Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



Hendy Satria, SE.M.Ak.,
NIDN. 1015069110 / Lektor

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Hendy Satria, SE.M.Ak.,
NIDN. 1015069110 / Lektor

Skripsi Berjudul :

**EVALUASI PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010 TENTANG
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DALAM
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA POLRES
TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

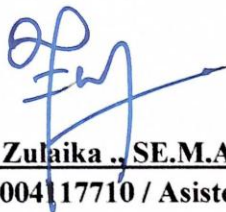
DWI NURSANTI

NIM : 12110055

Telah Dipertahankan Didepan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Enam Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk
Diterima

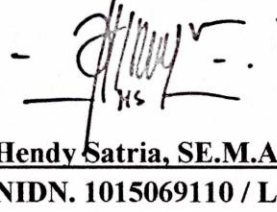
Panitia Komisi Ujian

Ketua,



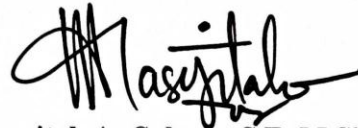
Nurfitri Zulaika .. SE.M.Ak.,CA
NIDN. 1004117710 / Asisten Ahli

Sekretaris,



Hendy Satria, SE.M.Ak.,
NIDN. 1015069110 / Lektor

Anggota



Masvifah As Sahara, S.E.,M.Si
NIDN. 1010109101 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 6 Februari 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

Ketua,



Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.,Ak.,CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

SURAT PERNYATAAN

Nama : Dwi Nursanti
NIM : 12110055
Tahun Angkatan : 2012
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,03
Program Studi : Akuntansi
JudulSkripsi : Evaluasi Penerapan PP No.71 Tahun 2010 Tentang
SAP Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan
Keuangan Polres Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila terdapat dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 6 Februari 2020
Penyusun,



DWI NURSANTI

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah puji dan syukurku pada Mu Ya Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan. Dan tidak lupa shalawat beriring salam dipanjatkan kepada Rasulullah SAW.

Alhamdulillah kupersembahkan karya kecilku untuk suami ku Masko Muryadi, kedua orang tua ku Bapak Sanwirja dan Ibu Suwikem dan Mertua ku Bapak Gusik Widodo dan Ibu Indrawati yang telah memberikan semangat serta doa yang tiada henti-hentinya. Bahkan tidak bisa kubalas kebaikan itu dengan apapun.

Alhamdulillah untuk kakak, keluargaku, sahabatku dan teman-temanku. Terimakasih atas suport dan doanya serta terimakasih selalu ada buatku. Membantuku melewati ujian ini.

Masyaallah Tabarakallah

MOTTO

“Waktu bagaikan pedang,jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik,mka ia akan memanfaatkanmu”

(Hadis Riwayat Muslim)

“Satu – satunya hal yang harus kau takuti adalah ketakutan itu sendiri.”

(Franklin D.Roosevelt)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat karunia dialah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”EVALUASI PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010 TENTANG SAP BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN POLRES TANJUNGPINANG”** yang disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana ekonomi program studi ekonomi akuntansi.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak CA selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.M.si Ak.CA wakil ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA selaku ketua program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjungpinang (STIE)
4. Ibu Nurfitri Zulaika,SE.,M.Ak selaku Asisten Ahli Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjungpinang,dan Pembimbing I yang turut membimbing serta memberikan motivasi penulis.
5. Bapak Hendy Satria,SE,M.Ak selaku sekertaris Prodi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjungpinang, dan Pembimbing II yang turut juga membimbing penulis.

6. Bapak Imran Ilyas M.M selaku Ketua Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjungpinang.
7. Seluruh dosen dan staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjungpinang.
8. Bapak Sriyono selaku Kasi Keuangan Polres Tanjungpinang yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dan pengambilan data.
9. Terimakasih untuk Masko Muryadi sebagai pendamping hidup yang selalu mendukung penulis untuk tidak patah semangat.
10. Terimakasih untuk semua orang-orang yang mendukung dan mendoakan penulis.

Semoga apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun dan demi kesempurnaan penulis merupakan harapan penulis dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Tanjungpinang, 6 Februari 2020

Penulis

DWI NURSANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB I TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Akuntansi.....	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi.....	9

2.1.2	Manfaat Akuntansi	10
2.2	Akuntansi Sektor Publik	11
2.2.1	Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.2.2	Elemen Elemen Akuntansi Sektor Publik	12
2.2.3	Fungsi dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	15
2.2.4	Basis Pencatatan Akuntansi.....	17
2.3	Standar Akuntansi Pemerintahan.....	20
2.3.1	Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah	20
2.3.2	Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan	21
2.3.3	Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan	23
2.3.4	Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	23
2.4	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	25
2.4.1	Penjelasan Umum	25
2.4.2	Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI	27
2.4.3	Komponen Laporan Keuangan.....	27
2.4.5	Laporan Realisasi Anggaran.....	28
2.4.6	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	29
2.4.7	Neraca.....	29
2.4.8	Laporan Operasional	30
2.4.9	Laporan Arus Kas	31
2.4.10	Laporan Perubahan Ekuitas	31
2.4.11	Catatan Atas Laporan Keuangan	32
2.4.12	Hubungan Antara Laporan Keuangan	33
2.5	Kerangka Pemikiran	33
2.6	Penelitian Terdahulu.....	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Metodologi Penelitian.....	41
3.2 Jenis Penelitian.....	41
3.3 Jenis Data.....	42
3.4 Teknik Pengolahan Data.....	42
3.5 Teknik Pengolahan Data Analisis Data	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	44
4.1.1 Sejarah Singkat Polres Tanjungpinang.....	44
4.1.2 Visi Kepolisian Resor Tanjungpinang.....	44
4.1.3 Misi Kepolisian Resor Tanjungpinang.....	45
4.2. Hasil Analisis Data	46
4.2.1 Analisis Makna Basis Akrual dalam Polres Tanjungpinang	46
4.2.2 Analisis Penyajian Laporan Keuangan Polres Tanjungpinang.....	47
4.2.3 Kendala Dalam Menyusun Laporan Keuangan.....	61
BAB V KESIMPULAN KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURICULUM VITA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Strategi Penerapan SAP	4
Tabel 4.1	Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2017 dan 2016	48
Tabel 4.2	Kepolisian Resor Tanjungpinang Neraca Per 31 Desember 2017 Dan 2016	49
Tabel 4.3	Kepolisian Resor Tanjungpinang Laporan Operasional Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016	51
Tabel 4.4	Kepolisian Resor Tanjungpinang Laporan Perubahan Ekuitas Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Sektor Publik	13
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Ringkasan Laporan Keuangan
- Lampiran II : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran III : Neraca
- Lampiran IV : Laporan Operasional
- Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran VI : Catatan Atas Laporan Keuangan
- Lampiran VII : Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran VIII: Penjelasan Atas Pos – Pos Neraca
- Lampiran XI : Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Operasional
- Lampiran X : Penjelasan Atas pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran IX : Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya

ABSTRAK

DWI NURSANTI

12110055

EVALUASI PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010 TENTANG SAP BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN POLRES TANJUNGPINANG

Skripsi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Kata Kunci : Laporan Keuangan, PP No 71 tahun 2010

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui apakah Polres Tanjungpinang sudah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangannya, mengetahui tantangan dalam pengimplementasian PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual di Polres Tanjungpinang

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi yang mana peneliti melakukan analisis data yaitu dengan cara Laporan keuangan Polres Tanjungpinang dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam pembuatan Laporan Keuangan Polres Tanjungpinang tidak membuat dua Laporan keuangan yaitu Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih karna Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum seperti Polda KEPRI dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat oleh Polres Tanjungpinang hanya menyajikan pendapatan dan belanja saja, Namun sudah menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan.

Berdasarkan hasil penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa tantangan pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual ditinjau dari sistem pengendalian intern yang terdiri atas lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Sumber : Buku dan Jurnal

Dosen Pembimbing : 1.Nurfitri Zulaika SE., M.Ak., Ak. CA
2.Hendy Satria., SE., M.Ak

ABSTRACT

DWI NURSANTI

12110055

EVALUATION OF APPLICATION OF PP NO. 71 YEAR 2010 ABOUT SAP BASED ACCRUAL IN PRESENTATION WILL BE POLRES TANJUNGPINANG

Essay.

School of Economics (STIE) Development

The purpose of this research is basically to know if the police of Tanjungpinang has applied PP No. 71 year 2010 about SAP based on accruals in the presentation of financial report, knowing the challenge in implementing PP No. 71 year 2010 about SAP based accruals in the police of Tanjungpinang

In order to analyse the data obtained in this study, authors use a descriptive analysis method i.e. method by arranging the obtained data and then interrelated and analyzed so as to provide information for troubleshooting Faced by which the researcher conducts the data analysis by means of the financial report Polres Tanjungpinang compared with government Regulation No. 71 year 2010 about government accounting standards.

In the making of the financial report Polres Tanjungpinang does not make any two financial statements that are statements of cash flows and budget balance change report more because the cash flow statement is only presented by entities that have common your functions such as The KEPRI Polda and more budget balance changes report are only presented by the General treasurer of the State and reporting entities that compose their consolidated financial statements. The report on budget Statement of budget Realization report created by the police of Tanjungpinang only presents income and shopping, but has already described the comparison between budget and realization in one reporting period.

Based on the results of this study also resulted in the conclusion that the challenge of government in implementing accrual-based accounting is reviewed from internal control system consisting of control environment; risk assessment; control activities; Information and communication; and monitoring has run as it should.

Source: Books and Journals

Supervising lecturer : 1.Nurfitri Zulaika SE., M.Ak., Ak. CA

2.Hendy Satria., SE., M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 dan masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman-pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Laporan keuangan merupakan gambaran kinerja suatu pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah tersebut. Informasi ini sangat berguna untuk pihak intern maupun ekstern. Pihak intern yang membutuhkan informasi ini adalah pemerintah itu sendiri yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan operasi yang telah berjalan selama satu periode, dan juga sebagai alat untuk analisis kegiatan dalam pengambilan keputusan masa yang akan datang. Pihak eksternal yang menggunakan informasi ini adalah Kreditor, Investor, Bank, Pemerintah dari daerah lain, ataupun pihak lain dari Negara asing untuk hal pinjaman luar negeri baik pusat maupun daerah.

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang masih bersifat sementara. Hal ini sesuai dengan amanat yang

tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual.

Perubahan pemberlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual membawa dampak/implikasi bagi proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Penerapan SAP berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem informasi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan komitmen. Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel.

Salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pemimpin organisasi/instansi itu sendiri. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja. Faktor selanjutnya adalah kurangnya sarana pendukung teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual.

Secara yuridis, keluarnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasinya penuh di tahun 2015. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada instansi tersebut.

Strategi implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, cara pertama adalah dengan melakukan implementasi secara sekaligus (*big bang*) dimana SAP berbasis akrual secara sekaligus diterapkan di seluruh kementerian/lembaga, dan cara kedua adalah dengan melakukan implementasi secara bertahap, dimana implementasi SAP berbasis akrual diterapkan secara bertahap beriringan dengan penyiapan SDM dan segala perangkat yang dibutuhkan oleh setiap kementerian/lembaga pada saat semua kementerian atau lembaga harus menerapkan SAP berbasis akrual. Implementasi penuh akan diterapkan di semua kementerian/lembaga pada tahun 2015 (Peraturan Pemerintah, 2010).

Berikut strategi penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintah) ,2011:

Tabel 1.1
Strategi Penerapan SAP

2010	<ul style="list-style-type: none"> • penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual; • mengembangkan framework akuntansi berbasis akrual; • sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.
2011	<ul style="list-style-type: none"> • penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi; • pengembangan sistem akuntansi dan Teknologi Informasi bagian pertama (proses bisnis dan <i>detail requirement</i>); • pengembangan kapasitas SDM.
2012	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan sistem akuntansi dan Teknologi Informasi (lanjutan); • pengembangan kapasitas SDM.

2013	<ul style="list-style-type: none"> • plotting beberapa Kementerian Lembaga dan Bendahara Umum Negara; • review, evaluasi dan konsolidasi seluruh LK; • pengembangan kapasitas SDM(lanjutan).
2014	<ul style="list-style-type: none"> • parallel run dan konsolidasi seluruh LK; • review, evaluasi dan konsolidasi seluruh LK; • pengembangan kapasitas SDM(lanjutan).
2015	<ul style="list-style-type: none"> • implementasi penuh; • pengembangan kapasitas SDM(lanjutan).

Polres Tanjungpinang merupakan salah satu instansi pemerintah dibawah naungan langsung Presiden, dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya Polres Tanjungpinang memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan akan tetapi masih belum optimal dalam menerapkan PP No.71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dalam penyajian keuangannya. Dilihat dari laporan keuangan yang ada masih banyak terdapat kekeliruan yang disebabkan beberapa hal.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik menganalisis Penyusunan Laporan Keuangan pada Polres Tanjungpinang apakah memenuhi kaidah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya, peneliti juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Evaluasi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Polres Tanjungpinang”.

1.2 Rumusan Masalah

Kehadiran PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual mewajibkan pemerintah daerah dan seluruh organisasi sektor publik untuk menerapkan laporan keuangan berbasis akrual. Oleh karena itu, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan Polres Tanjungpinang telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Polres Tanjungpinang dalam pengimplementasian PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Polres Tanjungpinang sudah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangannya.
2. Untuk mengetahui tantangan dalam pengimplementasian PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual di Polres Tanjungpinang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 agar dapat menerapkan

akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara maksimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dengan adanya identifikasi tantangan yang dihadapi instansi pemerintah dalam menerapkan basis akrual. Secara umum juga diharapkan kualitas dan kuantitas laporan keuangan dalam instansi pemerintah akan meningkat.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan standar akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai basis akrual. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah bagi peneliti dan orang-orang yang berminat mengkaji standar akuntansi pemerintahan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan mengenai Evaluasi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Polres Tanjungpinang, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan penelitian yang isinya antarlain pengertian Akuntansi Sektor Publik, Standar

Akuntansi Pemerintah dan teori tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta teori-teori yang dapat menunjang dalam penulisan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyajikan tentang metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data serta teknik dalam menganalisa data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini terdiri dari dua pokok bahasan utama, pertama akan membahas secara ringkasan gambaran umum objek penelitian, kedua akan memuat hasil analisis data penelitian

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini. Pertama penulis mencoba menarik kesimpulan tentang hal-hal yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Selanjutnya akan diberikan masukan-masukan serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai “bahasa bisnis”. Sebelum kita mengetahui lebih dalam dan lebih lanjut lagi tentang akuntansi sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui pengertian akuntansi dari beberapa ahli:

(Bahri, 2016) dalam bukunya Pengantar Akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS, menjelaskan bahwa Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelolaan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum.

Menurut (Mahmudi., 2010) akuntansi dapat didefinisikan sebagai seni pencatatan penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan Akuntansi adalah pelaporan keuanganyang mana disajikan untuk memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan.

2.1.2 Manfaat Akuntansi

Kita tidak akan pernah lepas dari kegiatan ekonomi dan masalah keuangan yang berhubungan akuntansi. Karena akuntansi telah menjadi landasan yang sangat penting terutama untuk para pelaku yang bergerak dibidang usaha atau yang berbaur dengan ekonomi. Para pelaku usaha menggunakan akuntansi sebagai alat untuk mempermudah proses kegiatan usahanya. Apabila akuntansi tidak ada maka kegiatan ekonomi sangatlah lambat baik dibidang perusahaan atau dibidang pemerintahan (publik). Jika sudah seperti itu, kegiatan ekonomi atau perekonomian yang ada dalam kehidupan tidak akan tumbuh dengan efektif dan efisien. Bukan hanya sekedar untuk landasan atau dasar kegiatan perekonomian dan pembukuan dan pencatatan transaksi.

Manfaat akuntansi juga cukup penting bagi bisnis yang akan memberikan dampak besar bagi perkembangan perekonomian didalam kehidupan maupun dalam bidang bisnis. Ada beberapa manfaat akuntansi diantaranya:

1. Pemilik Perusahaan. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemegang saham apakah mereka akan tetap mempertahankan modalnya atau akan mengambil modalnya untuk ditanamkan di perusahaan lainnya.
2. Kreditur. Mengetahui informasi mengenai kemungkinan perusahaan mampu atau tidak untuk mengembalikan pinjamannya.
3. Investor. Untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dan mengetahui atau memperkirakan prospek perusahaan dimasa yang akan datang
4. Pemerintahan. Untuk mengukur pendapatan nasional dan menyusun kebijakan ekonomi.

5. Manajemen. Untuk mengukur keberhasilan perusahaan serta sebagai dasar untuk menentukan kebijakan atau pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuannya.

2.2 Akuntansi Sektor Publik

2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Sektor Publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba). Sektor publik akuntansi sering diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu teknik dan analisis akuntansi yang digunakan pada organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik.

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintahan. Lembaga publik mendapatkan tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.

Menurut (Bastian, 2010) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di

lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2014) Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah maupun manajemen sebagai alat informasi bagi publik.

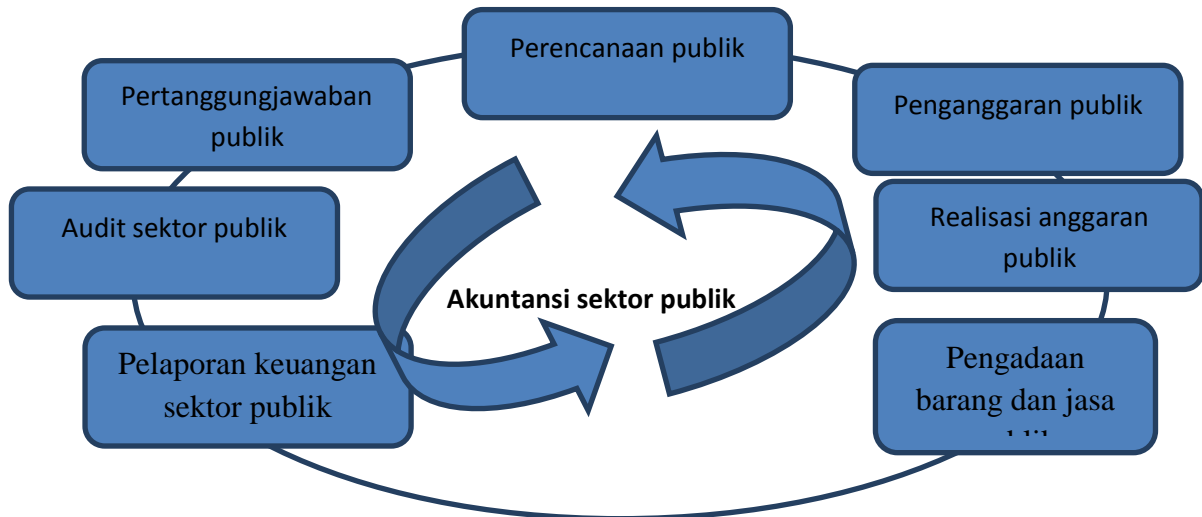
Menurut (Dedi, 2012) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dan masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta.

Dari definisi-definisi di atas akuntansi publik adalah pencatatan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban dan alat informasi bagi pemerintah dan sebagai bukti transparansi pengelolaan uang pemerintah kepada masyarakat, dan juga digunakan sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu lembaga atau pemerintahan.

2.2.2 Elemen Elemen Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Bastian, 2010) elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan sektor publik. Bagian-bagian ini dapat digambarkan dalam serangkaian siklus akuntansi sektor publik. Adapun peraga siklus akuntansi sektor publik digambarkan sebagai berikut ini.

Gambar 2.1
Siklus Akuntansi Sektor Publik



Sumber: Bastian 2010, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar

Pada peraga siklus akuntansi sektor publik, terlihat bahwa akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen berikut:

1. Perencanaan Publik

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat dimasa depan melalui aturan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU RI No. 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional pasal 1 poin 1). Proses perencanaan yang dilaksanakan ini akan menentukan aktivitas dan *focus* strategi organisasi sektor publik.

Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang diterapkan dengan

melakukan persiapan yang didasari pada data dan informasi yang tersedia saat ini.

2. Penganggaran publik

Berdasarkan UU No 17 tahun 2003, tentang keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrument kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan data stabilisasi perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh tiga faktor, yaitu pertama kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi; kedua, kesuksesan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan beberapa politisi berbagai lembaga; ketiga adalah akuntansi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik *review* atas perkiraan anggaran.

3. Realisasi Anggaran Publik.

Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

Pengadaan barang dan jasa adalah proses atau cara, dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

5. Pelaporan Sektor Publik.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan serta kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan.

6. Audit Sektor Publik

Dalam pembicaraan luas, pemeriksaan atau auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pengelola, asset Negara lainnya, atau organisasi publik nonpemerintahan seperti partai politik, LSM, yayasan dan organisasi ditempat peribadatan.

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki manfaat-manfaat yang pada dasarnya adalah mewujudkan tujuannya. Manfaat tersebut dapat diperoleh jika akuntansi

sektor publik dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Akuntansi Sektor Publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah baik sebagai manajemen maupun sebagai alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah informasi akuntansi digunakan sebagai proses pengendalian manajemen, mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

(Mardiasmo, 2014) menyatakan adapun karakteristik akuntansi sektor publik sebagai berikut :

1. Pemerintah tidak berorientasi laba sehingga didalam akuntansi publik tidak ada laporan laba (*income statement*) dan perlakuan akuntansi yang berkaitan dengannya.
2. Pemerintah melakukan pembukuan pada saat anggaran dipergunakan. Anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis.
4. Untuk menentukan indikator kinerja yang bersifat finansial sebagai dasar penilaian kinerja.
5. Dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik sebagai upaya untuk perwujudan akuntabilitas publik.

(Darise, 2012) menyatakan bahwa secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan pengelolaan;
2. Akuntabilitas dan laporan Retrospektif;
3. Kelangsungan organisasi;
4. Perencanaan dan informasi otoritasi;
5. Hubungan masyarakat;
6. Sumber fakta dan gambaran.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pada hakekatnya Akuntansi Sektor Publik memiliki fungsi, tujuan, dan manfaat yang sama dengan akuntansi pada umumnya. Yaitu aktivitas pencatatan, pengklasifikasi dan pengikhtisaran dan pelaporan yang bertujuan untuk akuntabilitas, penyedia informasi dan pengendalian.

2.2.4 Basis Pencatatan Akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada umumnya, terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basic*) dan basis akrual (*akrual basic of accounting*). Namun karena pemerintahan di Indonesia pada tahun 2004 belum siap menerapkan akuntansi basis akrual maka dikenal pula akuntansi basis kas menuju akrual (*cash toward accrual basic*). Basis kas dan basis akrual memiliki perbedaan dalam cara pencatatan transaksi ekonomi dan kejadian-kejadian lainnya. Disektor pemerintahan, dalam basis kas pencatatan pendapatan dan atau biaya dilakukan pada saat kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan dalam basis akrual, suatu transaksi ekonomi atau peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan

akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Penjelasan atas basis akuntansi tersebut adalah:

1. Akuntansi basis kas (*cash basic*)

Akuntansi berbasis kas adalah metode pencatatan suatu transaksi atau kejadian yang diakui atau dicatat ketika kas (uang) atas transaksi tersebut diterima atau dikeluarkan. Akuntansi berbasis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan kejadian lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Akuntansi basis kas memiliki kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut:

Kelebihan:

- 1) Relatif sederhana;
- 2) Mudah dipahami dan dilaksanakan;
- 3) Proses audit lebih mudah, dan;
- 4) Memudahkan dalam pengendalian belanja.

Kekurangan:

- 1) Mendorong kecenderungan belanja hingga menghabiskan anggaran;
- 2) Tidak ada pengendalian aset nonkas secara terkoordinasi melalui akuntansi;
- 3) Pembengkakan utang dan resiko kebangkrutan tidak terdeteksi melalui akuntansi dan laporan keuangan;
- 4) Tidak menggambarkan beban keuangan yang sebenarnya terutama beban penyusutan aset tetap;

- 5) Tidak mampu menghasilkan neraca sehingga negara tidak mengetahui posisi dan resiko keuangan;
- 6) Rentan terhadap manipulasi arus kas.

2. Akuntansi basis kas menuju akrual (*cash toward accrual basic*).

Akuntansi basis kas menuju akrual merupakan suatu pendekatan unik yang dikembangkan oleh Indonesia untuk dapat menyajikan empat laporan keuangan pokok yang diamanatkan UU dan disesuaikan dengan kondisi peraturan, sistem, sarana dan prasarana, serta SDM di Indonesia yang sampai dengan tahun 2004 masih menggunakan pembukuan tradisonal (*single entry*) berbasis kas, belum menggunakan akuntansi modern (*double entry*) sehingga sangat sulit bila langsung menggunakan akuntansi modern berbasis akrual. Akuntansi basis kas menuju akrual memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain:

Kelebihan:

- 1) Dapat menyediakan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan Undang-undang;
- 2) Lembaga pemerintah telah dapat mengimplementasikan cukup baik;
- 3) Lembaga pemerintah mampu menyediakan informasi akrual walaupun secara periodik dan dengan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem.

Kekurangan:

- 1) Belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan;
- 2) Tidak menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya;

- 3) Kurang memberikan jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas.

Informasi akrual hanya dapat disajikan secara periodik yaitu pada saat pelaporan. Bila sewaktu-waktu dibutuhkan informasi hak dan kewajiban maka diperlukan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem.

3. Akuntansi basis akrual (*accrual basic*)

Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengatakan dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh sumber daya dicatat. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka nilai lebih yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarnya informasi operasi atau kejadian. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kejadian tersebut dituangkan dalam laporan laba rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini diciptakan dalam bentuk laporan operasional atau laporan surplus/defisit.

2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

2.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut (Dedi, 2012), SAP merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurut (Siregar, 2015)SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

2.3.2 Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan

Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat.

Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan diterapkannya PP SAP maka seluruh instansi pemerintah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut (Dedi, 2012), beberapa upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik-praktik akuntansi di organisasi sektor publik telah dilakukan dengan baik oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) maupun oleh pemerintah sendiri. Diperlukannya paket standar akuntansi tersendiri karena adanya kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan komersial, yang

diantaranya adalah adanya kewajiban pertanggungjawaban kepada publik yang lebih besar atas penggunaan dana-dana yang dimiliki.

(Mardiasmo, 2014) menyebutkan di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, merupakan bagian dari organisasi sektor publik, sehingga diperlukan juga standar akuntansi tersendiri.

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintahan yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP (Dedi, 2012).

2.3.3 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. Menurut (Siregar, 2015) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan,

pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2.3.4 Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah Komite SAP. KSAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk mengembangkan SAP.

Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik di tingkat internasional, dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia, baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku, maupun kondisi sumber daya manusia. Selain itu, strategi peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan dilakukan dengan proses transisi menuju basis akrual.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 14 pernyataan, yaitu:

1. PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP 03 : Laporan Aliran Kas;
4. PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP 05 : Akuntansi persediaan;
6. PSAP 06 : Akuntansi Investasi;
7. PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan;
9. PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan;
11. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian (Dedi, 2012);
12. PSAP : Laporan Operasional
13. PSAP 13 : Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ;
14. PSAP 14 : Akuntansi Aset Tak Berwujud .

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

2.4.1 Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan SAP Berbasis Akruwal dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akruwal dan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal. SAP Berbasis Akruwal terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas.

Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis AkruaI. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis AkruaI.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akruaI menjadi akruaI, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara.

2.4.2 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI

Menurut (Mardiasmo, 2014) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah, dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain menyusun SAP, KSAP berwenang menertibkan berbagai publikasi lainnya, antara lain Interpretasi Standar Akuntansi

Pemerintah (IPSAP) dan Buletin Teknis, IPSAP dan Buletin teknis merupakan pedoman dan informasi lebih lanjut yang diterbitkan oleh KSAP guna memudahkan pemahaman dan penerapan SAP, serta untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan.

2.4.3 Komponen Laporan Keuangan

Kemudian didalam (PP 71, 2010) laporan keuangan yang harus dicatat bertambah menjadi tujuh jenis laporan keuangan yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Secara garis besar, penjelasan tentang jenis-jenis laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

2.4.5 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi

Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2.4.6 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan ini melaporkan mutasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan akumulasi saldo SILPA/SIKP dari LRA, adapun struktur SAL adalah sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih awal

1. Mempertanggungkan Saldo Anggaran Lebih
2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
3. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya

2.4.7 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah.

2.4.8 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi

biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

2.4.9 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

2.4.10 Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: Ekuitas awal, Surplus/Definisi LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana.

Menurut (Muindro Rrenyowijoyo 2010) suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas, maka menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

1. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
2. Setiap pos pendapatan belanja beserta totalnya seperti disyaratkan dalam standar-standar lainnya yang diakui secara langsung oleh ekuitas.
3. Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan

yang mendasar diatur dalam suatu standar yang terpisah.

Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan dalam lembar muka berupa saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, sertaperubahannya selama periode berjalan.

2.4.11 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporanberikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.4.12 Hubungan Antara Laporan Keuangan

(PP 71, 2010) mengakomodasi dua jenis pelaporan, yaitu laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan laporan finansial terdiri dari neraca, Laporan Operasional, Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

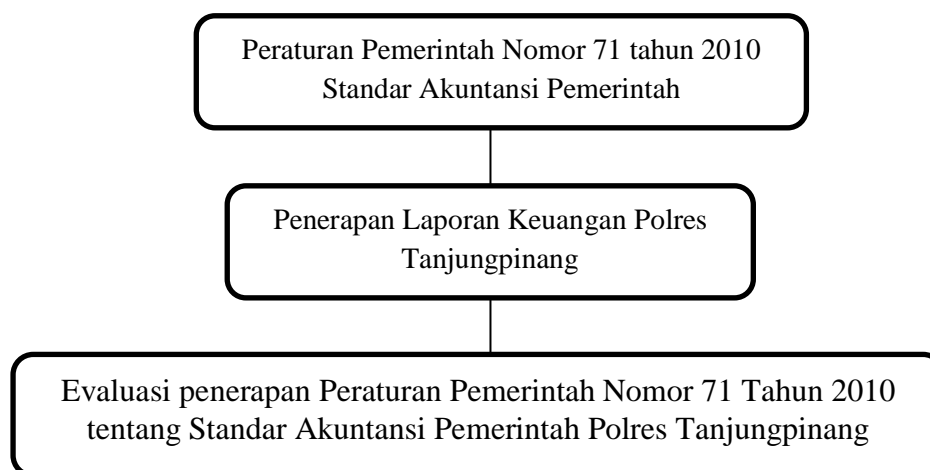
2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun dimana setiap instansi pemerintah harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dari hasil penelitian akan diperoleh apakah Polres Tanjungpinang patuh terhadap penerapan PP No. 71 tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan.

Dengan adanya kerangka pemikiran ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab

pertanyaan- pertanyaan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah kerangka konseptual yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti,2020

2.6 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, telah ditulis beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan (Abdullah, 2017) yang berjudul Analisa Akuntansi Pendapatan Perpajakan Dalam Rangka Akuntansi Berbasis Akrual. Akuntansi yang berbasis akrual akan menghasilkan lebih banyak informasi akuntabel, andal, dan transparan dibandingkan dengan akuntansi yang berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual dapat memberikan pengukuran yang lebih baik, mengakui tepat waktu, dan prediksi kewajiban di masa depan yang telah

akurat. Informasi berbasis akrual dapat memberikan informasi tujuan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang perpajakan. Jenis penelitian ini adalah observasional kualitatif. Sampel yang digunakan adalah data perpajakan properti pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau tahun 2014. Untuk menunjukkan hasil pengamatan bahwa KPP Pratama Baubau telah melakukan akuntansi pendapatan perpajakan dengan basis akrual yang berlaku, yaitu PP 71 tahun 2010 dan peraturan pendukung lainnya. Penghasilan perpajakan diakui saat timbulnya hak atas pajak properti. Pendapatan pajak KPP Pratama Baubau disajikan dalam Pelaporan Realisasi Anggaran dan laporan Operasional dan Hasil penelitian ini diharapkan akan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas dan dipertanggung jawabkan.

2. Penelitian ini dilakukan (Yuda, 2018) yang berjudul Evaluasi Penerapan Realisasi Anggaran Terhadap PP Tahun 2010 tentang SAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penerapan realisasi anggaran dan laporan keuangan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 berbasis akrual pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam menerapkan realisasi anggaran dan

laporan keuangan berbasis akrual telah menerapkan seutuhnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sejak Tahun 2015 dengan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memerlukan peningkatan sumber daya manusia untuk memahami Standar Akuntansi Pemerintah

3. Penelitian yang dilakukan (Asmiputri & Waluya, 2014) yang berjudul PP 71 Tahun 2017 dalam Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat UAPPA Kementerian Provinsi NTB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan standar akuntansi berbasis akrual (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010) dengan penyajian laporan keuangan Unit akuntansi Pengguna Anggaran Tambahan / area Merchandise (UAPPA / BW) Kementerian Pertanian Provinsi NTB. Penelitian ini menggambarkan penerapan Akrual Berdasarkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 menggunakan data dari hasil wawancara, neraca, laporan realisasi anggaran, pendapatan dan Informasi Pengeluaran Akrual dan catatan atas laporan keuangan, laporan lain yang mendukung tema penelitian, dan informasi yang terkandung di situs web BPTP NTB. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan meninjau kebijakan dan prosedur serta komponen penyusunan laporan keuangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Akrual berbasis SAP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Pembantu /

Barang Dagangan (UAPPA / BW) Kementerian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.

4. Penelitian yang dilakukan (Satrio, Yuhertiana, & Hamzah, 2016) tentang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di kabupaten Jombang. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 berdasarkan akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan realisasi tata kelola yang baik selain mengetahui kinerja pemerintah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual (SAP) membawa perubahan signifikan dalam sistem pelaporan keuangan. Perubahan diharapkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang posisi keuangan, menyajikan informasi aktual tentang hak dan kewajiban, dan berguna dalam mengevaluasi kinerja. Penelitian ini didasarkan pada metode interpretatif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan ditempat penelitian tersebut. Hasil menunjukkan bahwa Badan Lingkungan Pemprov menerapkan SAP berbasis akrual dalam laporan keuangan 2016 dan telah melakukan berbagai pelatihan. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman manajer keuangan Dewan Lingkungan pemerintah provinsi tentang SAP berbasis akrual, seperti sosialisasi dalam bentuk seminar atau diskusi dengan lembaga pemerintah lainnya, serta pelatihan terkait dengan SAP berbasis akrual.

5. Penelitian yang dilakukan (Watubun et al., 2010) yang berjudul Analisa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No 71 2010 di DPPKAS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Kabupaten Situbondo. Kemudian untuk mengetahui hal-hal apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang timbul dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian interpretif, penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Untuk kategori SDM dan Sistem Informasi adalah kategori cukup siap dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010. Kendala dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah antara lain, sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, jumlah SDM masih belum cukup atau petugas yang telah ikut pelatihan di mutasi ditempat lain, tidak adanya pendampingan khusus dari BPK karena keterbatasan sumber daya manusia.
6. (Sylvia, 2006) Penelitian Perusahaan dan Pengaruh Standar Akuntansi

Internasional Baru: International Financial Reporting Standards (IFRS). Artikel ini berfokus pada Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), yang telah dijelaskan oleh pihak berwenang sebagai pengembangan paling penting dalam bidang akuntansi. Ini mencakup latar belakang dan undang-undang yang berlaku di Uni Eropa dan bagaimana IFRS akan mempengaruhi semua negara termasuk AS. IFRS adalah seperangkat standar berbasis prinsip, yang menetapkan aturan-aturan yang mencakup semua sebagai lawan untuk mereseapkan perawatan akuntansi tertentu. Profesional bisnis informasi menganggap IFRS sebagai perubahan penting untuk pemahaman mereka dan penyampaian informasi perusahaan kepada penggunanya. Hal ini umumnya dipandang sebagai seperangkat standar kualitas akuntansi yang lebih tinggi.

7. Penelitian yang dilakukan (Hines, 2007) Standar Pelaporan Keuangan Internasional: Panduan untuk Standar Akuntansi Internasional. Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRSs), sebelumnya dikenal sebagai Standar Akuntansi Internasional, menjadi semakin penting dalam ekonomi global. Selama 35 tahun terakhir telah ada dorongan kuat terhadap penerapan seperangkat standar akuntansi keuangan yang seragam untuk menggantikan segudang standar negara tertentu yang sekarang digunakan. Sebuah tonggak utama menuju tujuan standar akuntansi global terjadi baru-baru ini. Mulai tahun 2005 sebagian besar perusahaan publik yang berdomisili di Uni Eropa diharuskan untuk menggunakan sistem IFRS ketika mempersiapkan laporan keuangan mereka. Makalah ini menyajikan kerangka

Standar Pelaporan Keuangan Internasional, termasuk peran badan pembuat peraturan dan di mana mengakses publikasi IFRS primer. Sebuah bibliografi beranotasi materi penjelasan IRFS dan Situs Web gratis yang berguna juga disertakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. (Jemmy Rumengan, 2015). Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif. Yang mana menurut pendapat (Sukmadinata, 2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial dan sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

3.3 Jenis Data

Jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Data Prime

(Sugiyono, 2015), mengungkapkan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2015) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan ataupun *literature* yang mempunyai hubungan dalam penelitian yang sifatnya melengkapi dan mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh data dari tempat penelitian berupa data laporan keuangan Polres Tanjungpinang.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara turun langsung pada lokasi penelitian untuk mengetahui dan mengamati fenomena yang terjadi pada perusahaan dengan lebih jelas. Teknik ini juga dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertatapmuka (*personal face to face interview*) dengan sumber data (responden).

2. Interview (Wawancara)

Menurut (Rumengan, 2015) *Interviwe* adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan jawaban atau pernyataan untuk melakukan Interview.

3. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori dan literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.

3.5 Teknik Pengolahan Data Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi yang mana peneliti melakukan analisis data yaitu dengan cara Laporan keuangan Polres Tanjungpinang dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

3.6 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Polres Tanjungpinang, yang beralamat di Jl. A. Yani No 1 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari. Waktu penelitian pada Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., Ekonomi, F., Muhammadiyah, U., & Tenggara, S. (2017). *Analisis Akuntansi Pendapatan Perpajakan Dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua/ Studi Kasus Kpp Pratama Baubau*.
- Asmiputri, R., & Waluya, A. (2014). *Peraturan Pemerintah No . 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat UAPPA / B-W Kementrian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat*. 4(71), 589–594.
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Jakarta: Andi.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Pt. Erlangga.
- Darise, N. (2012). *pengelola keuangan daerah edisi II*. Jakarta: PT. indeks.
- Dedi, N. (2012). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Edisi II*. Yogyakarta: Akuntansi Sektor Publik Edisi II.
- PP 71. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 SAP*.
- Rumungan, J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Pemerintah dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: YKPN.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Watubun, J. S., Akuntansi, P. S., Made, D. A., Si, M., Ca, A., Yogivaria, D. W., & Ak, M. (2010). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Di Kantor Dppkad Kabupaten Situbondo)*. 2010, 1–14.
- Yuda. (2018). *Evaluasi Penerapan Realisasi Anggaran dan Pelaporan Keuangan Terhadap PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemendagri No 64 Tahun 2013*. 2013(1), 1–8.

CURICULUM VITAE



Nama : Dwi Nursanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Uban, 21 Desember 1991

Status : Menikah

Agama : Islam

Email : dwi.nursanti91@gmail.com

Alamat : JL. Taman Sari No. 51 RT 02 RW 02 Tanjung Uban

Pendidikan : - SD Negeri 004 Binaan Bintang Utara (1997-2003)
- SMP Negeri 2 Binaan Bintang Utara (2003-2006)
- SMA YKPP Tanjung Uban (2006-2009)
- Sahid Bintang Tourism Institute (2009-2010)
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang (2012-2020)